

BAB IV

PELUANG DAN TANTANGAN NU SIDOARJO

DALAM USAHA PEMBERDAYAAN *CIVIL SOCIETY*

A. Peluang NU cabang Sidoarjo dalam mewujudkan *civil society*

Dilihat Secara analisis obyektif, Peluang NU dalam pemberdayaan civil society yakni, kecenderungan dunia Internasioanal mendukung berkembangnya masyarakat sipil, era reformasi memberi ruang bagi keterbukaan dan membuka peluang seluas luasnya bagi masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan, sistem politik dengan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menentukan pilihan politiknya menempatkan NU pada posisi strategis dan memiliki daya tawar tinggi.¹

NU cabang Sidoarjo juga memiliki kekuatan dalam usaha pemberdayaan masyarakat madani demi terwujudnya *civil society* yakni, , prinsip-prinsip ajaran NU akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat lokal sehingga memungkinkan untuk mudah diterima oleh masyarakat. Memiliki lembaga pesantren yang tetap eksis sebagai lembaga pendidikan dan penjaga tradisi atau khazanah keilmuan NU, dan kepemimpinan yang bersifat kharismatik dan ketauladanan (Kiai sejauh ini masih menjaga panutan dan tempat bertanya bagi masyarakat),

¹ Pengurus cabang NU Sidoarjo, *Hasil keputusan Musyawarah Kerja 1*, Massa Khidmah 2006-2011, (Ponpes Al Falah Siwalan Panji Buduran, 29 Shafar 1428 H/19 Maret 2007, hal 23

berkembangnya pemikiran kritis yang tetap berpijak kepada khazanah keilmuan dan budaya Aswaja di kalangan anak muda dan pesantren. NU yang mengakar kuat di masyarakat pedesaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan sebagian lagi berada di perkotaan, memiliki pendukung dan simpatisan dalam jumlah yang cukup besar²

Masyarakat bawah, tradisionalisasi, atau pedesaan yang merupakan basis massa NU, merupakan potensi besar bagi pengembangan NU, NU bersentuhan secara langsung dengan arus bawah sangat berkesempatan untuk memberdayakan mereka dengan kerja-kerja rintisan atau proyek-proyek pengembangan swadaya masyarakat. Baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak luar.

Rintisan-rintisan yang pernah dijalin dengan pihak luar sangat mendukung bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Baik di bidang ekonomi, sosial, keagamaan, maupun bidang yang lain. Sikap terbuka bagi pihak manapun untuk berdialog dengan NU. Terutama yang mempunyai kepentingan yang sama dalam hal perjuangan, merupakan jalan bagi NU cabang Sidoarjo untuk semakin memantapkan langkahnya dalam mewujudkan cita-citanya.

Kebesaran NU tidak bisa lepas dari para kadernya yang saat ini duduk sebagai birokrat atau tokoh penting dalam lembaga-lembaga Negara. Semakin banyaknya kader NU yang diberikan kepercayaan memimpin lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan, semakin menambah peluang

² *Ibid.*

NU dalam mewujudkan *civil society*. Peran mereka diharapkan mampu menjadi penggerak arus bawah sebagai sasaran gerakan pemberdayaan *civil society*, tentunya melalui asosiasi-asosiasi yang mereka tempati.

Misalnya, dulu waktu diangkatnya Sahal Mahfudz sebagai orang nomor satu di jajaran Majelis Ulama Indonesia. Dengan tampilnya beliau itu, membuka peluang bagi kuatnya sebuah asosiasi keagamaan seperti MUI dalam hubungannya dengan Negara. Tidak seperti ketika orde baru, dimana MUI menjadi legitimator Negara dalam memaksakan kebijakannya dalam hal yang berkaitan dengan Islam.

Kiranya peluang semacam ini patut dikembangkan oleh NU, ketika eksistensinya sangat erat dengan realisasi program menuju terciptanya kemaslahatan umat. Dalam bidang politik peluang NU untuk memberdayakan masyarakat sangatlah terbuka lebar, terlebih dengan perubahan paradigma politik bangsa ini. NU yang telah menciptakan rumah sendiri (mendirikan wadah aspirasi politik bagi warganya yang berupa PKB) sebenarnya semakin berpeluang memberdayakan masyarakat.

Apa lagi PKB sudah pernah melaksanakan Muhtamarnya yang pertama, dimana PKB siap menjadi partai terbuka, bukan hanya warga Nahdliyin yang diwadahi, namun seluruh lapisan masyarakat siap diterima PKB. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi NU untuk merealisasikan pemahaman kebangsaanya kepada semua lapisan masyarakat, terutama tentang pluralisme, disayangkan di tubuh internal PKB pernah terjadi konflik, yang mengakibatkan citra buruk di masyarakat.

Akibat perubahan sistem Negara ini pula, NU juga berkesempatan menciptakan ruang-ruang sosial politik, ekonomi, budaya yang mengarah bagi terwujudnya *civil society*. Yang menjadi ganjalan selama ini, diakui sebagai kelemahan NU adalah masalah ekonomi. Upaya-upaya NU dalam bidang ekonomi bukanlah sebuah upaya yang setengah-setengah, terbukti dengan kerja samanya dengan pihak luar. NU semakin memantapkan langkahnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Langkah ini patut dikembangkan pada sektor-sektor lain, semisal kekuatan. Sebagaimana Negara telah mencanangkannya sebagai salah satu sektor andalan ekonomi bangsa. Ditambah basis massa NU juga ada di pesisir yakni kaum nelayan. Dengan semakin memantapkan langkah-langkah yang sudah ada, NU bisa memberdayakan secara langsung kaum nelayan dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah.

Selain itu bangsa Indonesia yang saat ini mempunyai banyak persoalan nasional yang sangat membutuhkan penyelesaian secara cepat. NU bisa berusaha tampil memberikan sumbangan dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam pemecahan masalah yang bersumber dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan warga dan bangsanya. Keterlibatan itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi.

B. Tantangan NU dalam mewujudkan *civil society*

Kalau di atas disinggung masalah basis massa NU, yakni arus bawah, hal ini juga merupakan tantangan bagi NU. Dimana masyarakat arus

bawah, bahkan warga NU sendiri, terkadang kurang bisa merespon apalagi mengikuti dan merealisasikan, ide-ide cemerlang yang terlontar dari para elitnya. Ide-ide yang datang dari Alm. Gus Dur, misalnya, terkadang malah membuat warga NU bingung, apa maunya dengan ide itu? Hal ini disebabkan masih kurang fahamnya pola pikir sebagian warga NU, terutama yang ada di pedesaan dan jangkauan informasinya masih lamban.

Di samping itu warga NU mempunyai tingkat fanatisme yang cukup tinggi, yang tidak dibarengi dengan pola pikir yang cukup maju, fanatisme mempunyai potensi besar sekaligus tantangan tersendiri bagi NU. Bila fanatisme ini dalam arti implementasinya pada tempat yang sebenarnya, maka tidaklah persoalan, namun bila penempatannya keliru, maka jawaban atas pertanyaan muncul akibat kekeliruan itu menjadi pekerjaan NU untuk menyelesaikanya.

Fanatisme yang keliru ini biasanya terimplementasi pada sikap yang kurang difikir sebelumnya. Asalkan sesuatu yang berasal dari NU, maka pembelaan mati-matian akan dilakukan, bila sesuatu itu dapat serangan, baik opini ataupun serangan fisik, yang pernah terjadi dan sempat disesalkan oleh beberapa pengamat adalah sikap brutal yang dilakukan sebagian warga NU Sidoarjo ketika salah seorang tokohnya mendapat serangan opini buruk dari pihak lain, terlepas serangna itu realitas atau tidak, namun pembelaan yang dilakukan telah memberikan dampak buruk bagi proses demokratisasi.

Di samping itu, aksi dukung mendukung personil juga merupakan persoalan yang harus dipikir ulang oleh NU, terutama dalam hal kepentingan politik. Aksi dukung mendukung kepentingan politik, bila sudah keterlalu berakibat menghilangkan esensi organisasi NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang selama ini berjuang untuk mewujudkan demokratisasi. Bila hal ini tidak diantisipasi, tak ayal secara esensi NU akan berubah menjadi organisasi politik. Dan selanjutnya substansi organisasi sosial keagamaanya luntur.

Rentanya pembalikan arah NU pada persoalan politik praktis tersebut, ditambah NU mendeklarasikan PKB, terlebih bila PKB dapat menghimpun Negara ini. NU yang bergerak pada sosial keagamaan, bisa berganti bertransisi pada kekuasaan yang telah dicapainya.

Selain di sebutkan di atas tantangan PCNU Sidoarjo dalam pemberdayaan masyarakat madani demi terwujudnya *civil society* yakni, pertama modernitas dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, yang mempengaruhi perilaku. moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah. Modernisasi misalnya, berdampak pada sikap individualisme dan persaingan ketat dalam mempertahankan hidup, yang pada sikap tertentu mempengaruhi sistem hubungan sosial, kedua berkembangnya petualang politik dengan dukungan dana yang besar dapat memobilisasi simpati dan dukungsn dari massa.³

³ Pengurus cabang NU Sidoarjo, *Hasil keputusan Musyawarah Kerja I*, Massa Khidmah 2006-2011, (Ponpes Al Falah Siwalan Panji Buduran, 29 Shafar 1428 H/19 Maret 2007, hal 23-24.

NU cabang Sidoarjo juga memiliki kelemahan dalam usaha pemberdayaan masyarakat madani demi terwujudnya *civil society*, *Pertama*, adanya kesenjangan yang cukup berarti antara pelaksanaan program-program dan rencana yang dirumuskan dalam konferensi Cabang, kesenjangan tersebut terkait dengan lemahnya sikap professional dan manajemen organisasi kelembagaan. Selain itu *capacity building* para pengurus juga cukup lemah, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

Kedua, penguasaan konsep operasional dan metode kegiatan, sebagian besar pengurus NU, terutama pada struktur kelembagaan dan lajnah tidak aktif atau tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Akibat dari kondisi pada point 2 dan 3 di atas, upaya pemberdayaan terhadap umat yang berbasis pada kebutuhan riil (pemenuhan kebutuhan hidup) tidak terlaksana dengan baik.

Ketiga, tarik menarik kepentingan politik masih mewarnai dinamika internal NU. Sehingga, NU rentan dengan berbagai konflik kepentingan. Untuk melaksanakan semua programnya, NU tidak memiliki sumber dana yang memadai. Sehingga, program-program pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi seringkali terabaikan.⁴

⁴ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan penelitian mengenai peranan Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam pemberdayaan *civil society*, secara garis besar pemahaman yang dapat disimpulkan dari bab pertama hingga akhir, sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Dalam usaha pemberdayaan *civil society* NU cabang Sidoarjo telah banyak mencanangkan dan merealisasikan program-program kerjanya di semua bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal ini mencerminkan bahwa NU cabang Sidoarjo telah berjuang dalam pemberdayaan masyarakat madani demi terwujudnya *civil society*. Adapun dari program kerja yang belum terlaksana, hal ini akan dibahas pada rapat tahunan akhir anggota sebagai bahan evaluasi ke depannya.
2. Peluang NU cabang Sidoarjo dalam mewujudkan *civil society* antara lain, *pertama* basis massa NU yang cukup besar danuduknya kader NU cabang Sidoarjo dalam birokrasi, legislatif, dan eksekutif, dapat membantu kelancaran gerakan pemberdayaan masyarakat. *Peluang kedua*, era reformasi memberi ruang bagi keterbukaan dan membuka peluang seluas luasnya bagi masyarakat sipil untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan. *Peluang ketiga*, NU cabang

Sidoarjo Memiliki lembaga pendidikan dan pesantren yang tetap eksis sebagai penjaga tradisi atau khazanah keilmuan NU.

3. Tantangan NU cabang Sidoarjo dalam mewujudkan *civil society* antara lain, *pertama* modernitas dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru dapat mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah. Modernisasi misalnya, berdampak pada sikap individualisme dan persaingan ketat dalam mempertahankan hidup, yang pada sikap tertentu mempengaruhi sistem hubungan sosial. *Tantangan kedua*, untuk melaksanakan semua programnya NU cabang Sidoarjo tidak memiliki sumber dana yang cukup memadai, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program-program pemberdayaan umat. *Tantangan ketiga*, karena sibuknya sebagian pengurus dari masing-masing bidang, kurangnya koordinasi antar pengurus, dan kurangnya keaktifan para pengurus di masing-masing bidang, dapat berpengaruh pada pelaksanaan program-program kerja pemberdayaan umat.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.